

Nomor : **41/AYA-DIR/I/2023**
Lamp : 1 (satu) bendel.

Karanggede, 27 Januari 2023

Kepada Yth,

DPP Perbarindo dan Majalah Media BPR
KOMP. PATRA II No 46
Jl Jend. Ahmad Yani – Bypass
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510

Perihal : **“Laporan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat”**

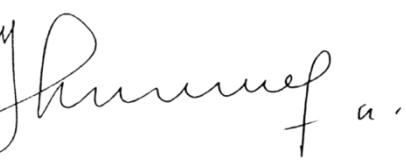
Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan sesuai POJK Nomor 3/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola periode Tahun 2022.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Arthayasa Ageng




Ika Retno Dinarawati
Direktur YMFK

Nomor : **40/AYA-DIR/I/2023**
Lamp : 1 (satu) bendel.

Karanggede, 27 Januari 2023

Kepada Yth,

Pemimpin Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Jl. Slamet Riyadi No. 328 Sriwedari Laweyan
di -
SOLO

Perihal : **“Laporan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat”**

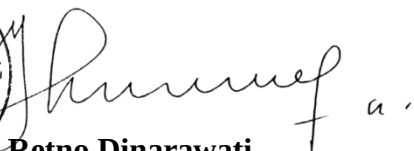
Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan sesuai POJK Nomor 3/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola periode Tahun 2022.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Arthayasa Ageng




Ika Retno Dinarawati
Direktur YMFK

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Arthayasa Ageng

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505286-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-601412-01022023103929

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

agengbank367@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-02-01 10:39:29



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA BPR

TAHUN 2022

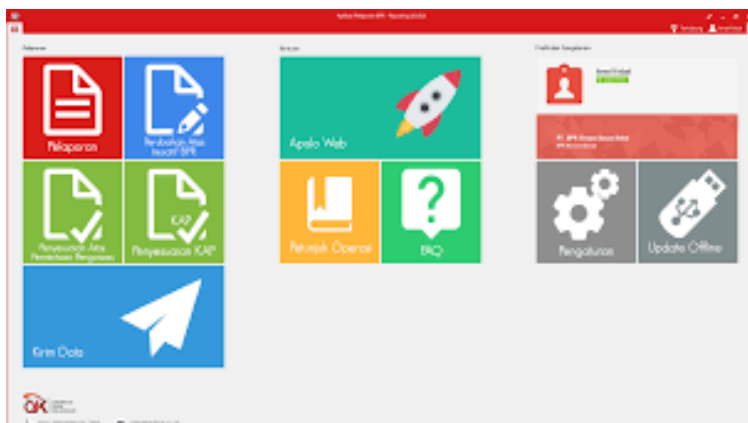
PT. BPR ARTHAYASA AGENG



- ✓ VIA APLIKASI PELAPORAN OJK (APOLO)
- ✓ SIP Perbarindo



v.3.8.9



Kantor Pusat: Jl. Prawirodigdoyo No 16 Karanggede - Boyolali 57381
Telp. (0298) 610765 Fax. (0298) 610781
Kantor Cabang : Jl Merak No 06 Klaseman – Salatiga
Telp / Fax : (0298) 6031196

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : Jl. Prawirodigdoyo No. 16 B Karanggede Boyolali

Nomor Telepon : 0298 610765

Penjelasan Umum : Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT dan SuratEdaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SE OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT, maka PT BPR Arthayasa Ageng pada tahun 2023 merealisasikan pembuatan laporan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2022 dengan mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan (Transparency), akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dengan penjelasan bahwa:a. Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan Informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.b. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya yang berjalan secara efektif. c. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat. d. Independensi (Independency) yaitu, pengelolaan BPR secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.e. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang- undangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Muhammad Taufiq	Direktur Utama	Merencanakan, mengorganisasikan dan menganggarkan sekaligus mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan usaha bank sesuai dengan Undang-undang Perbankan dan Peraturan Pemerintah/Otoritas Jasa Keuangan, Mengupayakan pencapaian tujuan perusahaan/Bank secara terukur dan sistematis, Mengkoordinir dan mengatur secara langsung seluruh kegiatan operasional Bank yang dilakukan oleh Kepala Bagian, Mengawasi dan memberikan persetujuan atas setiap transaksi keuangan dari dan sampai jumlah tertentu, Memberikan penilaian kinerja pada setiap Sumber Daya Manusia dengan di bantu Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan ataupun Pejabat Eksekutif (Personalia dan Umum), Pada situasi dan kondisi tertentu tanggungjawab dan wewenang dari Direktur Utama dapat dilimpahkan kepada Direktur dan atau Pejabat Eksekutif Bank yang dinilai cakap, Mempertanggung-jawabkan seluruh kegiatan usaha Bank kepada komisaris dan/atau kepada Rapat Pemegang Saham dan kepada pihak ekstern sekaligus mewakili Bank dalam seluruh tindakan dan kesempatan Menerima dan memeriksa seluruh laporan hasil operasional perusahaan atau bank baik dari data laporan keuangan maupun laporan hasil investigasi Kepala Bagian Personalia atas kinerja Sumber Daya Manusia, Bersama Direktur memutuskan sasaran, rencana kerja dan anggaran tahunan untuk diusulkan pada RUPSSendiri atau bersama Direktur memutuskan hal hal yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran ataupun Sumber Daya Manusia Bersama dengan Direktur memutuskan hal hal yang berkaitan dengan Operasional perusahaan Bersama dengan Direktur menetapkan pedoman professional kerja Bersama dengan Direktur menetapkan peraturan internal Bank Mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak III Mengambil keputusan terhadap permasalahan perusahaan yang diajukan oleh Direktur dan seluruh Kepala Bagian

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Ika Retno Dinarawati	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Menetapkan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, apabila terdapat kebijakan dan atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau peraturan perundang-undangan lainnya. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Melaporkan Kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR. Membantu Tugas tugas dari Direktur Utama. Mengkoordinir secara langsung seluruh kegiatan di bidang operasional. Mengawasi atau memberikan persetujuan atas transaksi keuangan sampai dengan ketentuan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Utama. Mempertanggungjawabkan semua tugas tugas yang menjadi tanggungjawabnya kepada Direktur Utama.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Drs. Ec. Djoko Soerdhijantono	Komisaris Utama	Kehadiran di Kantor BPR minimal sebulan sekali. Mengawasi dan memberikan saran saran kepada direksi dengan pengawasan langsung (OTS) dan tidak langsung (memeriksa berkas berkas).Menyetujui pembuatan pedoman pedoman kerja yang sesuai dengan ketentuan intern dan ekstern.Mengawasi dan mengevaluasi kebijakan antara lain kebijakan mengenai Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan manajemen resiko, dokumen dokumen kegiatan tersebut dilakukan secara lisan
2	Robertus Supriyadi	Komisaris Utama dan Independen	Kehadiran di Kantor BPR minimal sebulan sekali. Mengawasi dan memberikan saran saran kepada direksi dengan pengawasan langsung (OTS) dan tidak langsung (memeriksa berkas berkas).Menyetujui pembuatan pedoman pedoman kerja yang sesuai dengan ketentuan intern dan ekstern.Mengawasi dan mengevaluasi kebijakan antara lain kebijakan mengenai Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan manajemen resiko, dokumen dokumen kegiatan tersebut dilakukan secara lisan

Rekomendasi Kepada Direksi

Dekom telah merekomendasi pembuatan pedoman pedoman kebijakan BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Muhammad Taufiq	192.500.000	12,50

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kepemilikan saham anggota Direksi sebesar 12.5% atau sejumlah 192.500.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Muhammad Taufiq	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Ika Retno Dinarawati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan anggota Direksi pada BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Muhammad Taufiq	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Ika Retno Dinarawati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Drs. Ec. Djoko Soerdhijantono	192.500.000	12,50

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris sebesar 12,50% atau 192.500.000

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Drs. Ec. Djoko Soerdhijantono	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Robertus Supriyadi	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Drs. Ec. Djoko Soerdhijantono	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Robertus Supriyadi	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	24250000	2	13400000
2	Tunjangan	0	0	0	0
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		24250000		13400000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Mobil	Tidak Ada
3	Asuransi Kesehatan	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Fasilitas lainnya	HandPhone	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas yang disediakan oleh Direksi berupa mobil dan Handphone

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	37,73	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	70,18	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	70,13	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	55,44	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	38,60	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Perbandingan gaji terendah terhadap gaji tertinggi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	15-03-2022	2	Rencana Bisnis dan Realisasi Rencana Bisnis Rasio rasio Keuangan. Evaluasi Penetapan kebijakan strategis dan atau evaluasi realisasi rencana bisnis.Isu isu strategi
2	14-06-2022	2	Rencana Bisnis dan Realisasi Rencana Bisnis Rasio rasio Keuangan. Evaluasi Penetapan kebijakan strategis dan atau evaluasi realisasi rencana bisnis.Isu isu strategi
3	11-10-2022	2	Rencana Bisnis dan Realisasi Rencana Bisnis Rasio rasio Keuangan. Evaluasi Penetapan kebijakan strategis dan atau evaluasi realisasi rencana bisnis.Isu isu strategi
4	05-12-2022	2	Rencana Bisnis dan Realisasi Rencana Bisnis Rasio rasio Keuangan. Evaluasi Penetapan kebijakan strategis dan atau evaluasi realisasi rencana bisnis.Isu isu strategi. Rencana Bisnis Tahun 2022. Manajemen Resiko

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat pelaksanaan dalam satu tahun 2 kali pertemuan via telekonferensi dan 2 kali tatap muka

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Drs. Ec. Djoko Soerdhijantono	4	0	100,00
2	Robertus Supriyadi	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Jumlah Kehadiran pada tahun 2022 masih dalam situasi pandemi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	2	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

dalam tahun 2022 masih terdapat 1 dalam proses penyelesaian hukum dan 1 telah selesai

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20220103	Kegiatan Sosial	sumbangan untuk Masjid Alfajar 20220103	Masjid Alfajar	100.000
2	20220105	Kegiatan Sosial	Sumbangan untuk pondok pesantren jetis susukan 20220105	Ponpes Jetis	1.000.000
3	20220107	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220107	Kaum Duafa	100.000
4	20220114	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220114	Kaum Duafa	100.000
5	20220121	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220121	Kaum Duafa	100.000
6	20220121	Kegiatan Sosial	Dana sosial RT 07 RW0120220121	RT	10.000
7	20220128	Kegiatan Sosial	Santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220128	Kaum Duafa	100.000
8	20220202	Kegiatan Sosial	Sumbangan untuk pondok pesantren jetis susukan 20220202	Ponpes Jetis	1.000.000
9	20220203	Kegiatan Sosial	Sumbangan untuk Masjid Alfajar 20220203	Masjid Alfajar	100.000
10	20220204	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220204	Kaum Duafa	100.000
11	20220211	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220211	Kaum Duafa	100.000
12	20220218	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220218	Kaum Duafa	100.000
13	20220225	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220225	Kaum Duafa	100.000
14	20220225	Kegiatan Sosial	Dana sosial RT 07 RW 01 20220225	RT	10.000
15	20220301	Kegiatan Sosial	Sumbangan untuk pondok pesantren jetis susukan 20220301	Ponpes Jetis	1.000.000
16	20220302	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN UNTUK MASJID AL FAJAR KEBONAN 20220302	Masjid Alfajar	100.000
17	20220311	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220311	Kaum Duafa	100.000
18	20220318	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220318	Kaum Duafa	100.000
19	20220325	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220325	Kaum Duafa	100.000
20	20220401	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220401	Kaum Duafa	100.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
21	20220404	Kegiatan Sosial	sumbangan untuk Masjid Alfajar 20220404	Masjid Alfajar	100.000
22	20220404	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN UNTUK PONDOK PESANTREN JETIS 20220404	SUMBANGAN UNTUK PONDOK PESANTREN JETIS	1.000.000
23	20220408	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220408	Kaum Duafa	100.000
24	20220422	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220422	Kaum Duafa	100.000
25	20220422	Kegiatan Sosial	Dana sosial RT 07 RW 01 20220422	RT	10.000
26	20220509	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN UNTUK MASJID AL FAJAR KEBONAN 20220509	Masjid Alfajar	100.000
27	20220509	Kegiatan Sosial	Sumbangan untuk pondok pesantren jetis susukan 20220509	Ponpes Jetis	1.000.000
28	20220513	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220513	Kaum Duafa	100.000
29	20220520	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220520	Kaum Duafa	100.000
30	20220527	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220527	Kaum Duafa	100.000
31	20220602	Kegiatan Sosial	sumbangan untuk pondok pesantren jetis susukan 20220602	Ponpes Jetis	1.000.000
32	20220603	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220603	Kaum Duafa	100.000
33	20220604	Kegiatan Sosial	sumbangan untuk masjid Al Fajar Kebonan 20220604	Masjid Alfajar	100.000
34	20220610	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220610	Kaum Duafa	100.000
35	20220617	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220617	Kaum Duafa	100.000
36	20220624	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220624	Kaum Duafa	100.000
37	20220701	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220701	Kaum Duafa	100.000
38	20220701	Kegiatan Sosial	sumbangan untuk pondok pesantren jetis susukan 20220701	Ponpes Jetis	1.000.000
39	20220704	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220704	Kaum Duafa	100.000
40	20220707	Kegiatan Sosial	qurban 20220707	qurban	3.500.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
41	20220708	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220708	Kaum Duafa	100.000
42	20220715	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220715	Kaum Duafa	100.000
43	20220715	Kegiatan Sosial	Dana sosial RT 07 RW 01 20220715	RT	10.000
44	20220722	Kegiatan Sosial	santunan kaum duafa masjid Al Fajar 20220722	Kaum Duafa	100.000
45	20220729	Kegiatan Sosial	santunan kaum duafa masjid Al Fajar 20220729	Kaum Duafa	100.000
46	20220801	Kegiatan Sosial	Sumbangan untuk pondok pesantren jetis susukan 20220801	Ponpes Jetis	1.000.000
47	20220802	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN UNTUK MASJID AL FAJAR KEBONAN 20220802	Masjid Alfajar	100.000
48	20220805	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220805	Kaum Duafa	100.000
49	20220812	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220812	Kaum Duafa	100.000
50	20220819	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220819	Kaum Duafa	100.000
51	20220819	Kegiatan Sosial	Dana sosial RT 07 RW 01 20220819	RT	10.000
52	20220826	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220826	Kaum Duafa	100.000
53	20220901	Kegiatan Sosial	Sumbangan untuk pondok pesantren jetis susukan 20220901	Ponpes Jetis	1.000.000
54	20220902	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220902	Kaum Duafa	100.000
55	20220907	Kegiatan Sosial	Summbangan untuk masjid Al Fajar Kebonan 20220907	Masjid Alfajar	100.000
56	20220909	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220909	Kaum Duafa	100.000
57	20220916	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220916	Kaum Duafa	100.000
58	20220923	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220923	Kaum Duafa	100.000
59	20220924	Kegiatan Sosial	Dana sosial RT 07 RW 01 20220924	RT	10.000
60	20220930	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20220930	Kaum Duafa	100.000
61	20221003	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN UNTUK MASJID AL FAJAR KEBONAN 0221003	Masjid Alfajar	100.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
62	20221004	Kegiatan Sosial	Sumbangan untuk pondok pesantren jetis susukan20221004	Ponpes Jetis	1.000.000
63	20221007	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20221007	Kaum Duafa	100.000
64	20221014	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20221014	Kaum Duafa	100.000
65	20221021	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjis Al Fajar 20221021	Kaum Duafa	100.000
66	20221028	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20221028	Kaum Duafa	100.000
67	20221028	Kegiatan Sosial	Dana sosial RT 07 RW 01 20221028	RT	10.000
68	20221101	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN UNTUK PONPES JETIS 20221101	Ponpes Jetis	1.000.000
69	20221102	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN UNTUK MASJID AL FAJAR KEBONAN 20221102	Masjid Alfajar	100.000
70	20221104	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20221104	Kaum Duafa	100.000
71	20221111	Kegiatan Sosial	Santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20221111	Kaum Duafa	100.000
72	20221118	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20221118	Kaum Duafa	100.000
73	20221125	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa 20221125	Kaum Duafa	100.000
74	20221201	Kegiatan Sosial	sumbangan untuk pondok pesantren jetis 20221201	Ponpes Jetis	1.000.000
75	20221202	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20221202	Kaum Duafa	100.000
76	20221202	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN UNTUK MASJID AL FAJAR KEBONAN 20221202	Masjid Alfajar	100.000
77	20221202	Kegiatan Sosial	Dana Sosial RT 07 RW 01 20221202	RT	10.000
78	20221209	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20221209	Kaum Duafa	100.000
79	20221216	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20221216	Kaum Duafa	100.000
80	20221223	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20221223	Kaum Duafa	100.000
81	20221230	Kegiatan Sosial	santunan untuk kaum duafa masjid Al Fajar 20221230	Kaum Duafa	100.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

csr selama tahun 2022

Nama BPR	: PT. BPR Arthayasa Ageng
Posisi Laporan	: 31-12-2022
Alamat	: Jl Prawirodigdoyo 16 B Karanggede Boyolali
Nomor Telepon	: (0298) 610765
Modal Inti BPR	: 5.932.709.655,00
Total Aset BPR	: 31.183.646.411,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,4
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Penilaian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan tanggungjawab Dewan Komisaris sudah berjalan sesuai tata kelola. Untuk saat ini BPR Arthayasa Ageng belum mempunyai Komite dan untuk benturan kepentingan saat ini belum pernah terjadi benturan kepentingan . Didalam penerapan fungsi kepatuhan sudah sesuai dengan struktur dan infrastruktur tata kelola. Fungsi dari audit intern sudah berjalan secara baik dan untuk audit ekstern telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dalam operasional sehari-hari bank telah menerapkan sesuai manajemen risiko. Sampai dengan saat ini belum ada pelanggaran BMPK. Rencana Bisnis bank telah didukung oleh pemegang saham perseroan guna perkuatan modal dan infrastruktur yang memadai dan dibuat secara terukur. Bank telah melakukan transparansi atas semua produk sesuai dengan ketentuan OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,55	0,18	1,23	0.246	BPR sudah memiliki 2 anggota Direksi dan masing-masing anggota Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,50	0,10	1,21	0.182	BPR sudah memiliki 2 anggota Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	BPR tidak memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	2,00	0,80	0,20	3,00	0.300	Sampai saat ini belum terjadi adanya benturan kepentingan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,60	0,56	0,13	1,29	0.129	BPR telah memiliki Direksi YMK dan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,50	0,50	0,13	1,13	0.113	Fungsi dari audit intern sudah berjalan secara baik dan untuk audit ekstern telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	Fungsi dari audit ekstern sudah berjalan secara baik dan untuk audit ekstern telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,17	0,46	0,10	1,73	0.173	Dalam operasional sehari-hari bank telah menerapkan sesuai manajemen risiko
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Selama ini belum pernah ada yang melanggar BMPK
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Hasil RBB 2022 telah tercapai
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	BPR telah melaporkan keuangan secara transparansi melalui laporan publikasi dan media

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Nilai Komposit						1.4	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Modal inti kurang dari 50.000.000.000 dan salah satu direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang diangkat oleh RUPS sejak tanggal 1 April 2017
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Direksi bertempat tinggal pada kota/Kabupaten yang berbeda dengan lokasi kantor pusat, tetapi masih dalam propinsi yang sama
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Seluruh Direksi tidak merangkap jabatan apapun pada Bank, Perusahaan Non Bank atau lembaga lainnya
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau penyedia jasa profesionalisme sebagai konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruhn Direksi telah lulus uji Kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui rups termasuk perpanjangan masa jabatannya
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi telah melaksanakan tugasnya secara independen
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan PEAI, Audit Ekstern dan hasil pengawasan OJK
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi telah dapat menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat dan terkini, hal ini sehubungan dengan IT yang kami miliki sudah dapat mengakses hal tersebut secara real time
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	belum dapat berjalan sepenuhnya karena keterbatasan pengetahuan SDM yang ada dalam mengambil suatu kebijakan.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional dan tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Dlam meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan, sebagian dari SDM yang ada telah kami ikut sertakan dalam pendidikan yang berhubungan dengan hal tersebut.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi telah mengimplementasikan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi sudah melaksanakan sesuai tata tertib yang ada
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,55	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	telah melaksanakan pertanggungjawaban tugasnya kepada seluruh pemegang saham dalam rups tahunan maupun rups luar biasa
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Telah di komunikasikan dalam pembacaan Tata Tertib kepegawaian dan tersurt dalam KKB yang telah di syahkan oleh Disnakertrans
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Sebagian belum dilaksanakan
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Sebagian besar pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi berserta seluruh karyawan dalam pengelolaan BPR telah ditunjukkan. Baik dalam peningkatan kinerja Bank maupun dalam penyelesaian permasalahan
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Laporan Penerapan Tata Kelola hanya diserahkan : 1)Otoritas Jasa Keuangan 2). Asosiasi BPR 3). Media/majalah ekonomi keuangan
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Dengan jumlah Modal Inti kurang 50M Dewan komisaris telah berjumlah 2 orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan komisaris sama dengan jumlah anggota Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui rups termasuk masa jabatannya
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Salah satu anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal tetap pada propinsi yang berbatasan dengan propinsi dimana kantor pusat berdiri
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR masih kurang dari 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	sebagian sudah dilaksanakan dalam rapat setiap triwulan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Anggota dewan Komisaris tidak merangkap jabatan di bpr lainnya
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga baik dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan dalam kepengurusan, kepemilikan saham ataupun hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan komisaris telah secara rutin dilaksanakan serta nasehat tertulis yang terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dalam pengawasannya komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris sama sekali tidak terlibat dalam kebijakan pengambilan keputusan kegiatan operasional
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan komisaris selalu memantau tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan temuan audit sesuai waktu yang telah ditentukan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	sudah sesuai ketentuan
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional dan tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	sudah dilaksanakan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	sudah dilaksanakan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	BPR tidak memiliki komite audit dan komite pemantau resiko
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	BPR tidak memiliki komite audit
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	BPR tidak memiliki komite pemantau risiko
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	BPR tidak memiliki komite
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	BPR tidak memiliki komite
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	4	Dalam Proses penyusunan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Belum pernah terjadi benturan kepentingan antara Dewan komisaris Direksi dan Pejabat Eksekutif yang mengakibatkan kerugian Bank
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Selama ini belum pernah ada
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Penyaluran Dana yang menangani Direktur Utama
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Sudah memahami
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	Sudah menunjuk PE Kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Sudah tetapi belum sepenuhnya
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	Sudah memiliki ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,20	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Penyampaian laporan sudah sesuai dengan peraturan OJK
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	sudah melaksanakan upaya tersebut
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Seluruh komitmen kepada OJK selalu dipantau dan di jaga oleh Direksi YMFK
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	sudah sesuai ketentuan ojk
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Sudah tetapi belum sepenuhnya
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,56	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	tidak ada pelanggaran

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Belum sepenuhnya
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Belum pernah adanya penyimpangan dalam peraturan OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Fungsi dari audit intern sudah berjalan secara baik
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	Sebagian sudah dilaksanakan
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Sebagian sudah dilaksanakan
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	BPR sudah memiliki sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	Sudah dilaksanakan sesuai ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR masih kurang dari 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Suda dilaksanakan sesuai ketentuan
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	telah melakukan peningkatan mutu SDM secara berkala baik dengan pelatihan secara internal maupun eksternal
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah melaksanakan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR masih kurang dari 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah melaksanakan laporan pengangkatan dan penghentian Pejabat Eksekutif sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Telah dilaksanakan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Bank telah menunjuk KAP yang terdaftar pada kantor OJK serta telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham dan sudah melalui rups
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank dalam Laporan Tahunan telah mengirim hasil audit KAP beserta management letter
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Penyampaian hasil audit oleh KAP selalu tepat waktu
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan OJK

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan untuk merangkap fungsi manajemen resiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Dalam operasional keseharian bank selalu mengantisipasi tingkat resiko dan bank baru menyusun kebijakan manajemen resiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	4	dalam tahap proses
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	1	Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	sudah melakukan belum seluruhnya
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	sudah menerapkan
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sudah menerapkan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	sudah menyediakan
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	sudah melaksanakan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,14	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,46	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sudah menyusun laporan dan dilaporkan ke OJK
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	tahun 2022 belum ada produk baru
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	Sampai saat ini belum pernah terjadi pelanggaran BMPK. akan tetapi kebijakan tertulis sesuai POJK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	Bank selalu mengavaluasi dan mengkinikan kebijakan secara berkala atas BMPK dan selalu disesuaikan dengan peraturan perundang undangan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Telah sesuai dengan ketentuan OJK serta memperhatikan prinsip kehati hatian
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sampai saat ini tidak terdapat pemberian kredit yang melanggar dan atau melampaui BMPK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak terdapat pelanggaran BMPK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Telah sesuai dengan visi dan misi. serta telah mendapat persetujuan komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah disesuaikan dengan ketentuan OJK
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana Bisnis bank telah didukung oleh pemegang saham perseroan guna kekuatan modal dan infrastruktur yang memadai
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Dalam perencanaan bisnis bank selalu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang berpengaruh thdp operasional bank. azas perbankan yg sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen resiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris selalu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis secara berkala
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah disampaikan sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Sistem pelaporan data keuangan telah didukung dengan sistem IT yang baik
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Keuangan Publikasi telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank telah melakukan transparansi atas semua produk sesuai dengan ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Penyusunan dan penyajian laporan mengenai tata cara, jenis dan cakupan telah sesuai dengan ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah sesuai dengan ketentuan OJK dan telah disampaikan pelaporan secara tepat waktu
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Belum pernah terdapat pengaduan nasabah baik pada produk maupun dalam sistem pelayanan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthayasa Ageng

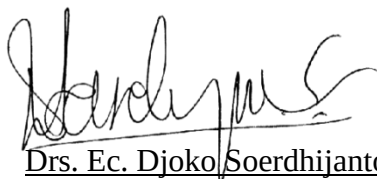
Posisi Laporan : 31 Desember 2022

LEMBAR PERSETUJUAN
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR ARTHAYASA AGENG
PERIODE TAHUN 2022

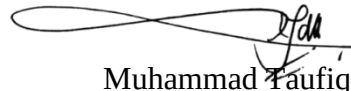
Telah disahkan dan disetujui di Boyolali, tanggal 27 Januari 2023

Tertanda,

PT BPR Arthayasa Ageng



Drs. Ec. Djoko Soerdhijantono
Komisaris Utama



Muhammad Fauziq
Direktur Utama

**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR ARTHAYASA AGENG**

Nama BPR : PT BPR ARTHAYASA AGENG
Posisi : 31 Desember 2022

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Nilai Komposit : 1,8

Peringkat Komposit : Baik

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (Self Assessment) terhadap setiap aspek yang terdapat dalam factor penilaian penerapan tata kelola tahun 2022 BPR Arthayasa Ageng, dimana penilaian dilakukan terhadap struktur yang telah terbentuk dalam manajemen dan infrastruktur yang cukup memadai dalam menunjang rangkaian proses tata kelola.

Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola pada BPR Arthayasa Ageng dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aspek Struktur pada penerapan tata kelola, pada seluruh factor atau indicator sebagian besar telah dilakukan pemenuhan baik terhadap setiap fungsi yang ada dalam manajemen dan ketersediaan infrastruktur yang salah satunya berbentuk kebijakan yang telah disusun. Walaupun pada beberapa indicator lain masih terdapat pemenuhan yang belum maksimal.
2. Rangkaian proses dalam penerapan tata kelola, sebagian besar factor penilaian penerapan tata kelola telah terlaksana dengan baik dan penerapan manajemen risiko juga telah dilaksanakan terhadap seluruh jenis risiko yang timbul namun bank tetap memperhatikan agar penerapan tata kelola dan penerapan manajemen risiko dapat

diterapkan secara baik.

3. Penerapan Tata Kelola sebagian besar factor penilaian penerapana tata kelola sebagian besar factor penilaian penerapan tata kelola cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek struktur sebagian besar telah terpenuhi sehingga proses penerapan tata kelola dapat berjalan dengan baik

Sepanjang tahun 2022, BPR Arthayasa Ageng telah berupaya melakukan pemenuhan struktur, penyusunan dan pengkinian kebijakan BPR serta pemenuhan dan penyesuaian beberapa fungsi dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank

Boyolali, 27 Januari 2023

PT BPR Arthayasa Ageng



Drs. Ec. Djoko Soerdhijantono
Komisaris Utama

Muhammad Taufiq
Direktur Utama